

RESPON ORGANISASI MASSA ISLAM TERHADAP SYIAH DI BANDUNG JAWA BARAT

ISLAMIC MASS ORGANIZATIONS' RESPONSES TO SHI'A MUSLIMS IN BANDUNG, WEST JAVA

ANIK FARIDA

Anik Farida

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
email: anik_farida@yahoo.
co.id
Naskah diterima 10 Mei 2014
Revisi 15 Mei – 20 Juni 2014
Disetujui 21 Juni 2014

Abstract

This article presents the results of a research on the responses of Islamic mass organizations towards Shi'a Muslims in Bandung City, West Java. Data collection methods used for this study include interviews, observation and document study. The author found that there are opposing responses toward Shia Muslims in Bandung, as represented by two Islamic organizations: FUUI (Forum Ulama Umat Indonesia) and MUHSIN (Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia). FUUI takes stand against Shia on the basis of theological purification arguments. On the other side, MUHSIN, while does not necessarily agree with interpretations of Islamic teachings held by Shia Muslims, is ready to accept their presence because MUHSIN's activists recognize the need to protect universal values, such as pluralism, tolerance, and civil rights.

Key Words: *Shia Muslims, pluralism, FUUI, MUHSIN, Bandung.*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang respon organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas) terhadap Syiah di Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa respon terhadap eksistensi Syiah di Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi dua yang direspresentasikan oleh dua Ormas, yakni Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) dan Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (Muhsin). FUUI menolak Syiah dengan argumen pemurnian teologis. Sedangkan Muhsin menerima keberadaan Syiah, tanpa harus menerima interpretasi ajaran Islam dari Muslim Syiah. Hal ini didasari oleh argumen untuk menjaga nilai-nilai universal, seperti pluralisme, toleransi, dan hak-hak kewarganegaraan.

Kata Kunci: Muslim Syiah, pluralisme, FUUI, MUHSIN, Bandung.

PENDAHULUAN

Sudah sejak lama di wilayah Jawa Barat berkembang bermacam-macam aliran kelompok keagamaan Islam dengan berbagai latar belakang ideologi dan mazhab. Sebagian besar berafiliasi dengan mazhab Sunni. Di luar mazhab Sunni, juga berkembang dua kelompok yang cukup besar, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Kehadiran kedua komunitas keagamaan ini sudah ada jauh sebelum kasus-kasus kekerasan bernuansa agama berkembang di masyarakat akhir-akhir ini.

Keberadaan kelompok yang dianggap sempalan, seperti pengikut Ahmadiyah dan Syiah telah menimbulkan berbagai reaksi dan respon dari masyarakat, mulai dari sikap individual, terorganisasi, bahkan mulai mengarah pada tindakan anarkis berupa penyerangan dan pengusiran sebagaimana yang terjadi di Sampang, Madura. Model hubungan antar ormas seperti ini sepertinya semakin sering terjadi, sebagai model respon yang diberikan ormas keagamaan terhadap kelompok sempalan. Setiap kali ada kelompok agama atau keyakinan baru yang muncul, masyarakat menjadi sangat reaktif dan tidak jarang menjadi konflik terbuka yang memakan korban jiwa.

Fenomena penyikapan terhadap kelompok yang dianggap sempalan memunculkan gerakan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) baru yang dibentuk sebagai gerakan anti-sempalan, gerakan anti aliran sesat atau gerakan anti pemurtadan. Salah satu kelompok yang dianggap sesat adalah Syiah. Sikap ini mulai berkembang pada beberapa Ormas di Jawa Barat (Suara Islam 2012). Pada mulanya, sikap ini hanya menjadi bagian dari wacana dan pemahanan di kalangan

pengikut Ormas Islam yang berbasiskan mazhab Sunni. Tetapi, sikap tersebut mulai bergeser menjadi konflik terbuka, seperti yang disampaikan Ormas FUUI dengan mendeklarasikan fatwa yang menegaskan Syiah sebagai ajaran sesat. Pada April 2012, ratusan ulama dari berbagai daerah berkumpul di Masjid Al-Fajr-Kota Bandung. Mereka merupakan peserta musyawarah yang diprakarsai atas undangan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Musyawarah tersebut merupakan musyawarah ulama dan umat Islam Indonesia ke-2 dengan agenda "Merumuskan Langkah Strategis untuk Menyikapi Penyestatan dan Penghinaan Para Penganut Syi'ah" (Hidayatullah 2012).

Penelitian tentang respon Ormas terhadap Syiah di Jawa Barat sangat relevan dalam konteks kebutuhan yang diamanatkan oleh Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, karena hasilnya dapat merekomendasikan kebijakan tentang model dan pola relasi yang mungkin dikembangkan oleh semua elemen, termasuk pemerintah untuk memelihara kemajemukan bangsa, sehingga akan melahirkan harmoni intern dan antarumat beragama.

Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi data dan argumentasi dalam membangun kebijakan kehidupan antar kelompok agama, terutama terkait dengan kelompok-kelompok minoritas. Hasil penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Dengan terumuskannya bentuk respon dan hubungan antara kelompok keagamaan sebagaimana dihasilkan oleh penelitian ini, maka diharapkan pemahaman keagamaan umat menjadi semakin inklusif

dan toleran. Penelitian ini akan menjadi bahan dalam penguatan pemahaman hubungan antara kelompok keagamaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan paradigma kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian agama sebagai gejala sosial. Maka, pendekatan sosiologi menjadi pilihan untuk digunakan, yang melihat dinamika, respon dan pola perubahan serta perkembangan dalam masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah respon/reaksi yang diberikan Ormas di luar Syiah terhadap Syiah. Dalam fokus ini meliputi, pola dan landasan dari respon yang diberikan Ormas (dalam hal ini Ormas Forum Ulama Umat Indonesia/FUUI dan Majelis Ukhuwah Sunni Syiah/Muhsin) terhadap Syiah di Jawa Barat.

Syiah dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini karena beberapa argumen berikut: *Pertama*, Syiah adalah kelompok keagamaan transnasional. Pengikut Syiah menyebar di banyak negara Islam. Artinya, hubungan antara kelompok Syiah dan Sunni atau kelompok Islam lain juga merupakan fenomena transnasional. Maka kasus yang terjadi di Indonesia juga akan mendapat efek secara transnasional pula. *Kedua*, Syiah dalam konteks Indonesia merupakan kelompok minoritas dibanding pengikut Sunni. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas, baik oleh negara maupun oleh kelompok *mainstream*, yaitu kelompok Sunni. Kelompok ini dijadikan objek kajian karena kasus intoleransi dan kekerasan yang dilakukan sejumlah Ormas terhadap mereka.

Sementara dua kelompok Ormas lain, yaitu FUUI dan Muhsin dipilih untuk

menggambarkan respon Ormas terhadap keberadaan Syiah di Jawa Barat. Argumen yang melandasi pilihan ini karena:

1. Kedua kelompok ini relatif sebagai Ormas baru yang muncul pada periode reformasi. Pada beberapa hal, kelompok ini memiliki program secara khusus untuk merespon kelompok yang dianggap sempalan.
2. FUUI adalah Ormas yang didirikan dan berkembang hanya di wilayah Jawa Barat, sehingga kelompok ini dapat menjadi gambaran dan representasi dari model Ormas yang spesifik di Jawa Barat.
3. FUUI dan Muhsin dapat menggambarkan dua model respon yang berbeda terhadap kelompok Syiah. FUUI secara umum sebagai Ormas yang menolak keberadaan Syiah, sementara Muhsin adalah ormas yang sejak awal berdirinya merupakan wadah aliansi berbagai Ormas lain yang bersimpati terhadap kelompok Syiah. Dengan dua ormas yang bertolak belakang ini diharapkan dapat memotret dan menjelaskan dua model respon yang berbeda terhadap Syiah di Jawa Barat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lebih detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Dari wawancara ini diperoleh data penelitian berupa pendapat, pikiran, harapan, dan komentar seputar persoalan yang diteliti. Untuk membantu peneliti

dalam memfokuskan masalah yang diteliti dibuat pedoman wawancara semi struktur. Di antara informan kunci adalah pimpinan dan anggota ormas FUUI dan Muhsin Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syiah di Jawa Barat

Jalaludin Rahmat—pendiri Yayasan Muthahari Bandung dan Ketua Dewan Syuro Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)—menyebut, bahwa Syiah sebagai sebuah kelompok untuk pertama kalinya muncul di Bandung (Tempo 2012). Dia membedakan kemunculan Syiah di Nusantara pada beberapa fase. Menurutnya, Islam yang pertama kali masuk ke Aceh sekitar abad ke-8 atau berada pada periode kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ketika itu, orang Hadramaut dari Arab masuk ke Aceh untuk berdakwah, tapi mereka tidak menunjukkan dirinya Syiah, melainkan ber-*taqiyah* (berpura-pura) menjadi pengikut mazhab Syafi'i. Dalam pandangannya, hal ini menjadi alasan bahwa secara kultur Nahdlatul Ulama adalah Syiah, tapi tidak pernah ada sejarah yang merekam jejak mereka. Karenannya, para ahli menganggap tidak ada Syiah masa itu. Masa tersebut dianggap sebagai fase pertama dari masuk Syiah di Nusantara (Rahmat 2000).

Pandangan ini memang berbeda dengan teori lain yang menyatakan justru pengikut Sunni yang lebih dulu masuk ke Nusantara. Para peneliti sendiri berselisih mengenai kepastian hal ini. Zulkifli (2009) menyatakan terdapat dua teori di kalangan sarjana dalam soal mazhab mana yang pertama masuk ke Indonesia. *Pertama*, teori yang diterima oleh

kebanyakan sarjana sejarah menyatakan, bahwa paham Sunni lebih dulu masuk ke Indonesia. Teori ini hingga kini lebih banyak diyakini berdasarkan pada sejumlah fakta, bahwa pengikut Sunni lebih banyak di Indonesia. *Kedua*, teori yang meyakini, bahwa aliran Syiah telah ada sejak Islam muncul di Nusantara. Penjelasan ini memiliki kesamaan dengan apa yang dikatakan Jalaludin Rahmat dengan masuknya Islam di Aceh.

Pada penyebaran gelombang kedua, Syiah masuk sekitar 1982. Berawal dari revolusi Islam di Iran pada 1979-1980-an, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan di Iran dari pemerintahan otokrasi, Mohammad Reza Shah Pahlavi yang dilakukan ulama populer Ayatullah Ruhollah Khomeini. Memanfaatkan momentum kelahiran Iran sebagai "negara Syiah" dan euforia revolusi yang menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya, Syiah di dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia mulai berani menunjukkan jati dirinya. Gerakan-gerakannya pun mulai tersusun secara sistematis dalam kerangka kelembagaan atau organisasi-organisasi yang pahamnya berafiliasi terhadap Syiah. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa sebagai sebuah paham, Syiah baru ada pasca 1979.

Revolusi yang dipimpin Khomeini ini menarik perhatian mahasiswa Indonesia. Keberhasilan gerakan revolusi Iran menginspirasi gerakan Islam di Indonesia yang selalu gagal dalam pertarungan politik (van Bruinessen 1992). Apa yang dilakukan Imam Khomeini dengan revolusi Islam di Irannya menjadi harapan. Gairah untuk mengkaji keberhasilan revolusi Iran semakin terkonsentrasi di lingkungan masjid kampus. Para civitas akademika, khususnya aktivis

Islam giat mengulas buku-buku revolusi Iran, mengenal Syiah, mempelajari ideologi serta filosofinya. Fenomena tersebut menjadi cikal bakal berkembangnya gerakan Syiah di kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satu perkembangan tersebut berpusat di Masjid Salman ITB Bandung.

Atas dasar ini, Jalaludin menyebut bahwa untuk pertama kali Syiah sebagai kelompok muncul dan berkembang di Bandung. Menurutnya, gagasan dan pemikiran Syiah saat itu sudah menjadi bagaian materi dalam pelatihan kepemimpinan di kalangan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan mulai tersebar ke kampus di daerah lain. Aktivis HMI menyebarkan ajaran Syiah secara sistematis, yakni melalui pelatihan kepemimpinan.

Syiah mengalami perkembangan selanjutnya, yaitu ketika orang Syiah mulai membentuk ikatan. Misalnya, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang berdiri pada 1 Juli 2000. IJABI merupakan organisasi massa yang diakui keberadaannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Berbeda dengan fase sebelumnya, penyebaran Syiah kali ini tidak mengutamakan fikih, tetapi lebih mengedepankan akhlak. Alasannya, fikih sudah menimbulkan konflik. Dalam pandangan ketua dewan Syuro IJABI (Jalaludin Rakhmat), yang terpenting adalah integrasi bangsa, Islam bersatu dan Indonesia tenteram. Karena itu, IJABI sebagai gerakan Syiah di Indonesia lebih fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan.

Khusus untuk di Jawa Barat sendiri, terdapat dua lembaga yang menjadi wadah bagi aktivitas komunitas Syiah, yaitu Yayasan Al-Jawad dan Yayasan Pendidikan Islam Muthahari. Keduanya berada di wilayah

Bandung. Lembaga ini menjadi media penting dalam pengembangan kegiatan dan penyebaran paham Syiah di Jawa Barat, bahkan Nusantara. Yayasan Muthahari menyelenggarakan beberapa kegiatan dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Secara khusus untuk bulan Ramadhan, Muthahari juga menyelenggarakan kajian keislaman, filsafat, dan tasawuf. Kegiatan seperti ini juga menjadi daya tarik tersendiri sekaligus media penyebaran gagasan Syiah kepada masyarakat. Kegiatan yang berbentuk seperti pengajian berkontribusi pada bertambahnya jumlah simpatisan maupun yang menjadi pengikut aktif paham Syiah. Sebagian peserta aktif dalam acara kajian di Mutahhari adalah kalangan muda, baik aktivis maupun pelajar dan mahasiswa.

Tidak ada angka resmi mengenai jumlah pengikut Syiah di Jawa Barat. Namun, pada beberapa kegiatan tahunan seperti ritual Asyura jumlah pengikut Syiah di Kota Bandung dapat mencapai angka 400.000 orang (okezone 2011). Jalaludin Rahmat—pendiri sekaligus pimpinan Mutahhari—memberikan alasan tidak adanya angka resmi pengikut tersebut. Menurutnya, salah satunya disebabkan karena tidak semua pengamal ajaran Syiah mau memperlihatkan identitas ke-Syiahannya, mereka lebih memilih ber-*taqiyyah* di tengah lingkungan mayoritas pengikut Sunni di tanah air.

Selain kedua lembaga di atas, gagasan Syiah di Jawa Barat juga berkembang pesat melalui publikasi beberapa buku tentang Syiah di bawah perusahaan penerbitan Mizan. Kehadiran beberapa buku terjemahan dari karya tokoh-tokoh Iran, seperti Ali Syariati, Khomeini, serta Murthadha Muthahari telah menjadi persemiaan bagi berkembangnya simpatisan dan pengikut

Syiah di wilayah ini. Penerbit Mizan sejak awal didirikannya pada 1983 oleh Haidar Bagir sudah memulai dengan wacana Syiah. Buku pertama yang diproduksi berjudul *Dialog Sunni-Syiah* yang ditulis Syafaruddin Al-Musawi. Lantaran buku ini pula, Haidar dan Mizan, oleh kalangan tertentu, dituding hendak menyebarkan ajaran Syiah. Padahal, menurut Haidar, buku itu berisi dialog penuh toleransi dan diterbitkan semata-mata demi menciptakan sikap saling memahami antar berbagai mazhab dalam Islam. Masa itu, acapkali muncul tulisan di berbagai terbitan yang mencaip Syiah sebagai ajaran sesat.

Faktor yang cukup menentukan dalam popularitas Syiah di Jawa Barat mungkin terjadi setelah berdirinya Yayasan Muthahari pada 3 Oktober 1988 oleh Jalaludin Rakhmat. Kiprahnya dengan lembaganya ini dengan cepat menarik minat kalangan anak muda dari berbagai latar belakang Ormas untuk mempelajari Syiah. Bahkan gaya orasinya sempat populer dan menjadi *trend setter* di kalangan aktivis pergerakan dan mahasiswa Islam di wilayah Bandung.

Tidak berhenti di Mutahhari, dia kemudian pada tahun 2000 mendirikan Ikatan Jamaah Ahlul Biat Indonesia atau IJABI sebagai wadah organisasi bagi pengikut Syiah. Menurutnya, pendirian IJABI merupakan fase keempat dari sejarah pengikut Syiah di Indonesia, setelah fase pertama penyebaran, fase Revolusi Iran, berdirinya lembaga-lembaga, dan yang mutakhir adalah berdirinya IJABI pada tahun 2000. Lembaga ini pun seakan identik dengan sosok Jalaludin Rahmat. Pada tahun 2011, Rakhmat bersama beberapa aktivis dari organisasi lain berinisiatif mendirikan Majelis Ukhuwah Sunni Syiah (Muhsin) di

Jakarta dan menyusul kemudian di Bandung dan beberapa kota di Indonesia.

Respon Ormas FUUI dan Muhsin Terhadap Syiah di Jawa Barat

Sejauh ini, respon Ormas keagamaan terhadap Syiah di Jawa Barat terbilang wajar dan tidak mengarah pada tindakan ekstrim dengan kekerasan. Tetapi eskalasi ke arah konflik terbuka bukan tidak mustahil akan terjadi, terutama dengan beberapa kegiatan yang dilakukan Ormas seperti FUUI semakin intens dan massif. Terutama setelah keluarnya fatwa sesat terhadap Syiah dari FUUI pada 2011 silam. Bukan mustahil jika respon mengarahkan pada kekerasan sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah, misalnya pada April 2000 terjadi penyerangan terhadap bangunan dan fasilitas pesantren Syiah Al-Hadi Pekalongan yang dibakar dan dihancurkan. Kemudian pada Februari 2011, terjadi "penyerangan" atau kerusuhan di dalam kompleks Pesantren YAPI Bangil antara santri YAPI dan warga Sunni. Awal Januari 2012 konflik terjadi di Pesantren Tajul Muluk d Sampang Madura.

Masih pada pada tahun 2012, juga terjadi bentrok di Jember yang disebabkan isu gesekan dakwah Syiah. Yang paling ekstrim adalah pengusiran warga Syiah Sampang Madura dari tanah kelahiran mereka. Konflik ini malah menjadi isu nasional dan masih belum terselesaikan hingga kini. Kasus tersebut untuk menunjukkan, bahwa respon yang dilakukan ormas terhadap Syiah di Jawa Barat dapat berubah menjadi sikap yang ekstrim dan menjadi tindakan anarkis. Pada penelitian ini, akan digambarkan dua model respon ormas terhadap Syiah di Jawa barat.

Kelompok pertama, kontra dan menolak. Respon ini dilakukan oleh FUUI. Ormas yang berbasis di Bandung ini menganut mazhab Sunni. Selain aspek teologis yang berbeda, pada beberapa pertemuan antara dua tokoh kunci organisasi ini sepertinya tersirat konflik personal. Meski belum terungkap, tetapi pada salah satu diskusi terbuka di UIN Bandung konflik personal tidak bisa ditutupi.

Keberadaan FUUI sangat penting dalam rangka menolak Syiah, pasalnya kelompok ini merupakan aliansi dari beberapa kelompok Islam lain yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Terbentuknya forum ini bermula dari sebuah forum silaturahmi antara sejumlah ulama senior di Bandung. Silaturahmi ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Beberapa ulama senior penggiat kumpulan ini adalah KH. M Rusyad Nurdin, (Alm) KH. Latief Mukhtar, (Alm) KH. Mukti Nurdin, DR. Yusuf Amir Faisal. Pada mulanya, lembaga ini sebagai media silaturahmi para ulama dalam membicarakan persoalan umat. Pada saat tertentu kadang diselenggarakan acara lebih resmi dengan mengundang para ulama se-Jawa Barat. Agenda dalam kumpulan tersebut adalah dalam rangka merespon persoalan di kalangan umat. Di antara persoalan yang pernah mendapat perhatian, sehingga diselenggarakan acara resmi adalah masalah kebijakan pemerintah tentang SDSB, juga usulan Menteri Agama, Munawir Sadzali yang ingin mengganti hukum waris.

Beberapa kali silaturahmi, perkumpulan ini kemudian berkembang menjadi sebuah forum resmi. Pada tahun 2001, bertempat di Masjid Al-Furqan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, para ulama mendeklarasikan sebuah forum yang diberi

nama Forum Ulama Umat Islam (FUUI). Pada waktu itu hadir kurang lebih 62 ulama yang berasal dari berbagai ormas dan lembaga Islam. Meski awalnya forum ini terdiri dari para ulama di sekitar wilayah Jawa Barat, namun akhirnya berkembang menjadi forum ulama seluruh Indonesia, sehingga cakupannya pun tidak hanya lokal Jabar, tapi menasional. Pada 3 Juni 2005, FUUI mengadakan musyawarah ulama seluruh Indonesia.

Di dalam pandangan pengurus FUUI, bahwa konsep kunci dalam memperbaiki kondisi umat Islam adalah dengan kembali kepada syariat Islam. Karena itu, FUUI dalam berbagai kegiatannya berupaya untuk mendakwahkan pentingnya penegakan syariat Islam di Indoensai. Bahkan, Ketua FUUI, KH. Athian Ali menyebutkan, bahwa hal tersebut sebenarnya yang menjadi alasan utama berdirinya FUUI, yaitu dalam rangka menegakkan syariat Islam, membina persatuan umat dan yang paling sering dilakukan adalah menjaga akidah umat. FUUI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Selain ceramah juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) anti pemurtadan, diklat mengatasi aliran sesat, dan diklat dakwah terhadap non-Muslim. Selain itu, beberapa divisi khusus juga melakukan berbagai macam investigasi, penerbitan dan lainnya.

Pada beberapa tahun terakhir, FUUI sudah banyak menangani aliran sesat, termasuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Jaringan Islam Liberal (Muzakki 2006). Untuk hal ini, FUUI membentuk Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS). Pada salah satu *release* yang dilansir beberapa media, TIAS menyebutkan bahwa sejak Reformasi sudah berkembang sekitar 250 aliran sesat di

seluruh Indonesia, dan 50 di antaranya ada di Jawa Barat. Sebagian aliran tersebut ada yang aktif dan banyak yang tidak aktif. Ada sebagian merupakan hasil rekayasa politik sementara sebagian kelompok betul-betul menyimpang dari ajaran Islam. Pada tahun 2011 silam, FUUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Syiah. Fatwa tersebut dihasilkan melalui sebuah konferensi yang melibatkan para ulama dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Keluarnya fatwa merupakan bentuk sikap dan respon FUUI terhadap ajaran dan kegiatan Syiah, terutama yang ada di wilayah Jawa Barat.

FUUI sebagai Ormas yang kontra terhadap Syiah mengimplemantasikan bentuk penolakannya dengan berbagai program dan kegiatan.

1. Dakwah, kajian, dan fatwa

FUUI pada awalnya dikenal sebagai majelis taklim atau pengajian. Pusat kegiatannya berada di Masjid Al-Fajar. Tema yang dibahas dalam pengajian umumnya adalah tentang tema-tema keislaman seperti tauhid, akhlak, dan tarikh. Tetapi dalam perkembangannya, Ormas ini juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dalam pembahasan di majelis taklim yang diselenggarakan secara rutin seminggu sekali. Salah satu tema aduan yang banyak disampaikan masyarakat adalah munculnya aliran sesat dan penyimpangan ajaran Islam. Karena itu, pada beberapa kali pertemuan pernah dibahas tentang aliran yang berkembang pasca reformasi, seperti NII Al-Zaitun, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Islam Liberal, hingga yang terakhir adalah ajaran Syiah.

Penolakan terhadap Syiah didasari pada temuan dan pembahasan dalam pengajian yang dipimpin KH. Athian Ali Da'i. Hasil dari kajian tersebut juga disampaikan pada kesempatan dakwah dan ceramah yang dilakukan para pengurus serta pengikut FUUI di berbagai daerah. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan sikap anti Syiah kepada masyarakat akar rumput. Terlebih lagi banyak penggiat FUUI adalah ustaz dan pengelola majelis taklim memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Puncak dari respon dalam bentuk yang pertama ini adalah dengan diselenggarakannya pertemuan para ulama pada tahun 2012 di Majelis Al-Fajar, Cijagra Bandung. Pertemuan ini diinisiasi oleh FUUI dengan mengundang para ulama dari seluruh Indonesia, termasuk MUI Pusat, ormas-ormas Islam dan juga pemerintah, seperti Walikota dan Gubernur Jawa Barat.

Pertemuan di atas menghasilkan sebuah fatwa yang menegaskan tentang kesesatan Syiah. Berikut, isi Fatwa Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) Nomor 04/Rabiuts Tsani/1433 tentang Syiah:

1. Pribadi/kelompok yang meyakini, mengajarkan dan menyebarkannya secara keseluruhan maupun sebagian dari paham Syiah di atas, yang meyakini dirinya pengikut Syiah maupun tidak adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam.
2. Umat Islam wajib membatasi interaksi, baik pribadi maupun kelompok dengan pengikut paham Syiah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka.

3. Pemerintah Indonesia berkewajiban mengambil tindakan terhadap pribadi maupun kelompok Syiah, karena telah menodai kemurnian ajaran Islam sekaligus untuk menghindari konflik yang lebih besar sebagaimana terjadi di negara-negara lain.

Pada banyak kasus kekerasan terhadap kelompok agama, fatwa sering kali menjadi pemicunya. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap Syiah di Sampang, Madura. Demikian juga yang selama ini menimpa Ahmadiyah, banyak diinspirasi dan dilandasi oleh keberaan fatwa sesat oleh MUI terhadap kelompok Ahmadiyah ini. Karena itu, fatwa yang dikeluarkan FUUI terhadap kelompok Syiah di Jawa Barat sangat beresiko memicu terjadinya konflik horizontal yang dilakukan, baik oleh masyarakat di luar FUUI maupun oleh anggota FUUI sendiri terhadap Syiah di wilayah ini.

Lebih jauh fatwa ini kemudian diikuti beberapa rekomendasi untuk mendukung tersosialisasikannya fatwa tersebut, di antaranya:

1. Merekomendasikan kepada MUI Pusat agar mengeluarkan fatwa tentang kesesatan paham Syiah dan menghentikan seluruh kegiatannya dari pusat sampai daerah.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesesatan Syiah, melalui berbagai lembaga atau forum *halaqah* yang bersifat ilmiah bekerjasama dengan berbagai lembaga sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
3. Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan

Kejaksaan Agung agar mencabut izin seluruh organisasi, yayasan, atau lembaga yang berada di bawah naungan Syiah dan atau yang berpaham Syiah.

4. Merekomendasikan kepada pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menutup kegiatan Iranian Corner di seluruh perguruan tinggi Indonesia.
5. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui pertemuan tahunan seluruh tokoh, ormas, para ulama dan cendekiawan Islam seluruh Indonesia.
6. Mengajak bertaubat kepada seluruh tokoh dan penganut Syiah agar kembali kepada ajaran Islam yang benar (Ahlussunnah Wal Jama'ah) dan apabila tidak, maka akan memproses secara hukum mereka sebagai bentuk penistaan agama seperti pada kasus Jalaludin Rakhmat di Makassar dan kasus Tajul Muluk di Sampang Madura.
7. Forum ini bersama-sama seluruh masyarakat Muslim Indonesia siap mengawal seluruh hasil rekomendasi sampai ada tindakan kongkrit dari pihak terkait (MUI Pusat, Kejaksaan Agung, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Mabes POLRI).
8. Mengusulkan kepada UIN Alauddin Makassar agar meninjau kembali rencana pemberian gelar doktor by riset kepada Jalaludin Rakhmat, yang ditengarai sebagai tokoh penggiat Syiah di Indonesia.

2. Publikasi Anti Syiah

Bentuk kedua, dari respon FUUI adalah publikasi anti Syiah. Selain menyelenggarakan pengajian, FUUI juga memiliki buletin dan website. Khusus untuk mensosialisaikan fatwa sesat Syiah, buletin *Syakhshiyah Islamiyah* yang dikeluarkan seminggu sekali mengangkat tema khusus tentang kesesatan Syiah secara umum. Tema ini muncul dalam edisi 25/IX April 2012.

Di dalam bulletin itu disampaikan beberapa dalil dan argumen tentang kesesatan Syiah. Selain itu, FUUI juga mendesak pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, MUI, dan ormas Islam lain untuk juga mengeluarkan fatwa sesat terhadap Syiah. Pada lembaran terakhir, FUUI menegaskan akan menggalang aliansi dan membentuk forum mahasiswa anti-Syiah. Langkah ini sangat strategis, karena selama ini mahasiswa dan kampus merupakan kelompok yang paling banyak menjadi simpatisan Syiah.

Publikasi juga dilakukan dengan berbagai media Islam lain, terutama yang *online*. Beberapa media milik kelompok Islam seperti www.hidayatullah.com, VOA Islam, dan lain-lain juga menjadi ruang publikasi anti Syiah.

3. Pembentukan Opini

FUUI selain memiliki media sendiri juga sangat intens dengan media. Dalam setiap program yang diselenggarakan dilakukan *press conference*, termasuk ketika fatwa tentang sesat Syiah disampaikan ke publik. Bahkan, beberapa pengurus FUUI menjadi narasumber utama di beberapa stasiun radio lokal, seperti radio Risalah dan termasuk juga RRI Bandung. Salah satu acara yang diasuh pengurus FUUI, ustaz Tardjono,

bernama Titian Ilahi disiarkan di Jawa Barat dengan salah satu tema favoritnya adalah mengangkat tema aliran sesat. Cara ini cukup efektif dalam membangun opini publik tentang kesesatan satu kelompok.

4. Menggalang Solidaritas

Respon penolakan terhadap Syiah tidak hanya dilakukan dalam wacana. FUUI juga menggalang solidaritas terhadap kelompok Sunni yang dalam penilaian mereka dizalimi oleh kelompok Syiah dukungan rezim Bashir Al-Assad. Secara khusus, FUUI menggalang solidaritas terhadap perjuangan rakyat Suriah sebagai representasi dari kelompok Sunni. Pihak FUUI juga menggalang dukungan berupa penghimpunan pejuang yang siap diberangkatkan ke Suriah untuk membantu pejuang rakyat Sunni dari penindasan rezim Syiah penguasa Suriah.

Acara ini pernah dilakukan, misalnya pada tabligh akbar peduli Suriah, tabligh yang keempat untuk di Bandung kali ini diadakan di sekretariat FUUI. Hadir sebagai pembicara KH. Athian Ali Da'i sebagai Ketua FUUI, Syaikh M. Al-Khatib Assuri dan Abu Abdullah, relawan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) yang baru kembali dari bertugas di Suriah. Acara tabligh kali ini diselenggarakan oleh Divisi Syakhshiyah Islamiyyah FUUI bekerjasama dengan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) dan dilaksanakan di Masjid Al-Fajr, markas FUUI yang berlokasi di jalan Cijagra Raya, Buah Batu Bandung.

Acara seperti ini digelar agar umat memahami hakikat sebenarnya apa yang terjadi di Suriah, sehingga umat memiliki kewajiban untuk membantu saudaranya yang sedang terzalimi. KH. Athian Ali Da'i menjelaskan, bahwa musuh Islam tidak

selalu memakai baju kafir, bahkan banyak yang justru menggunakan baju Islam, dan mereka ini lebih berbahaya dari yang pertama, sehingga umat Islam tidak banyak yang mengerti tentang hal ini. Acara yang serupa juga dilaksanakan pada Tabligh Aksi Solidaritas dari Muslimin Indonesia untuk Muslimin Suria & Penggalangan Dana Bantuan yang diselenggarakan pada Senin 31 Desember 2012 bertempat di Masjid Baitul Rahman Taman Kopo Indah 1, Jl. Kopo Km 7 Margahayu Bandung.

Kedua, respon yang pro dan mendukung terhadap Syiah Jawa Barat. Untuk melihat kategori ini kemunculan Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (Muhsin) di Jawa Barat menjadi satu contoh kasus. Keberadaan Muhsin di Jawa Barat tidak lepas dari Muhsin Pusat yang didirikan lebih dulu di Jakarta. Pembentukan Muhsin berawal dari kedatangan Jalaludin Rakhmat ke Dewan Masjid Indonesia (DMI), kemudian setelah melakukan pertemuan beberapa kali muncul ide membentuk Muhsin. Maka pada 20 Mei 2011 didirikan Majelis Ukhuwah Sunni Syiah pusat yang dideklarasikan di Jakarta. Majelis ini digagas oleh dua organisasi Islam, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI). Demikian pula pembentukan Muhsin di Bandung tidak lepas dari inisiatif dua lembaga di atas. Secara pribadi, Jalaludin Rahmat menjadi tokoh penting dalam berdirinya Muhsin di wilayah Bandung.

Pada proses pendirian Muhsin Jawa Barat banyak melibatkan Ormas di luar Syiah. Bahkan pada waktu acara deklarasi diundang sedikitnya 60 lembaga, baik itu ormas Islam, kepemudaan maupun dari pemerintah. Bahkan Walikota Bandung Dada Rosada dan Departemen Agama pun diundang, namun

mereka tak datang. Sementara itu, Ketua IJABI Jalaludin Rakhmat, yang merupakan penggagas organisasi Muhsin menegaskan, bahwa pembentukan Muhsin bukan untuk mencampurkan dua paham atau ajaran kedua aliran, yaitu: Sunni dan Syiah, melainkan hanya sebagai tempat untuk berkumpul, berdialog, dan melakukan kegiatan sosial. "Masalah ajaran itu masing-masing "bagimu agamamu bagiku agamaku". Ingat menjalin ukhuwah Islamiyah adalah perintah Allah dalam Al-Quran," tegasnya.

Pendirian Muhsin sebagai bentuk aliansi kelompok-kelompok yang pro dan mendukung keberadaan Syiah di Jawa Barat, lebih tepat dilihat sebagai upaya kelompok Syiah. Dalam hal ini, Jalaludin Rakhmat dalam menggalang solidaritas dan memperjuangkan eksistensinya. Tidak terlalu tampak inisiatif yang kuat dari ormas-ormas yang terlibat dalam mengkampanyekan dan mendukung Syiah. Pada beberapa kali program yang diselenggarakan, muatan Syiah sangat mendominasi, baik secara finansial, kepengurusan maupun konten yang disajikan dalam program tersebut. Sikap seperti ini tidak selalu diterima oleh kalangan ormas yang tergabung dalam Muhsin (wawancara dengan Ali Masrur, Ketua Iran Corner UIN Bandung).

Keberadaan Muhsin memang mendapat reaksi yang beragam dari berbagai kalangan Islam. Banyak orang menilai, bahwa aliansi ini hanya akan menjadi aliansi yang rapuh. Bagaimana pun perbedaan Sunni dan Syiah sudah menyebar dan terjadi di mana-mana. Faktor perbedaan doktrin dan sejarah ini memang tidak mudah diredam, terlebih lagi semakin diperkuat dengan konflik yang terjadi di beberapa negara yang juga ikut kelompok-kelompok di luar Syiah dapat

dipahami sebagai wujud dari dukungan terhadap nilai pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap hak kelompok minoritas, dan bukan sebagai dukungan terhadap ajaran Syiah itu sendiri. Aliansi ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan FUI yang semua kelompok yang tergabung di dalamnya berlandaskan pada kesamaan doktrin, yaitu Sunni.

Jika dilihat dari kelompok yang ikut mendeklarasikan Muhsin di Jawa Barat lebih banyak yang berbasiskan dan memperjuangkan nilai toleransi dan pluralisme. Kelompok seperti Jakatarub (Jaringan Antar Iman) misalnya, adalah sebuah kelompok jaringan antar iman yang sudah lama mengkampanyekan nilai-nilai toleransi. Dalam pandangan Wawan, Ketua Jakatarub, nilai yang menjadi titik temu dalam wadah Muhsin adalah penghormatan pada hak minoritas, demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Umumnya, kelompok yang tergabung dalam Muhsin Jawa Barat berbasiskan pada ajaran Sunni, tetapi mereka lebih moderat dan menghormati hak-hak warga Syiah.

Respon pro dan dukungan terhadap Syiah oleh Ormas Muhsin lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan kajian. Ada beberapa acara yang pernah diprakarasi di antaranya Festival Seni Budaya Islam. Acara tersebut sebenarnya merupakan bentuk Gelar Budaya Indonesia – Iran yang didukung oleh pemerintah Iran. Muhsin sendiri menjadi pelaksana dari kegiatan tersebut.

Acara ini didukung penuh Yayasan Muthahari Bandung dan IJABI. Ada beberapa pertunjukan dan berbagai stand kesenian kaligrafi, buku-buku maupun

seni pertunjukan. Dalam acara pembukaan tersebut dihadiri Ketua Dewan Syura IJABI, Jalaludin Rakhmat, Pengurus Muhsin Pusat Daud Poliradja, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahmoed Farazandeh, Atase Kebudayaan Iran, Ali Rabbani serta beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutan Dubes Iran, Mahmoed Farazandeh mengatakan, bahwa kegiatan festival tersebut sangat penting artinya bagi kedua negara. Mengingat keduanya sebagai negara berpenduduk Muslim dan sama-sama mempunyai semangat militansi.

Muhsin juga menyelenggarakan acara kajian keislaman, seperti filsafat dan tasawuf. Terakhir acara tersebut dilaksanakan selama bulan Ramadhan bertajuk kajian Ramadhan yang bertempat di aula Yayasan Muthahari. Selain itu, praktis tidak ada acara lain yang secara khusus didesain sebagai dukungan terhadap Syiah di Jawa Barat. Pada kedua acara yang pernah dilakukan Muhsin juga tidak terlihat kontribusi atau partisipasi aktif dari Ormas yang semula hadir dalam deklarasi Muhsin di Bandung. Hal ini ditegaskan Wawan, Ketua Jaringan Antar Iman (Jakatarub), bahwa pasca deklarasi tidak ada tindak lanjut dari program Muhsin, apalagi yang melibatkan Ormas-ormas pendukung deklarasi. Wawan melihat, bahwa teman-teman Syiah seperti berupaya mencari ruang dengan memanfaatkan Ormas-ormas lain yang mendukung mereka. Sewaktu deklarasi, semua urusan ditangani oleh orang-orang Syiah, baik acara, desain panggung, konten, dan lain-lain. Dia melihat, Ormas-ormas yang diajak hanya menjadi peserta dan penonton saja. Termasuk teks deklarasi, semuanya sudah disiapkan, tanpa ada konfirmasi kepada Ormas peserta lain

yang hadir. Kekhawatiran yang sama juga dikemukakan Ali Masrur (Ketua Iran Corner) yang bernaung di Fakultas Ushuluddin UIN Bandung. Pihaknya sudah menolak beberapa permintaan penyelenggaraan acara, karena dinilai terlalu mendominasi. Mereka menjadikan pihak lain hanya sebagai pelengkap saja, karena itu pihak kampus menolaknya, karena dinilai tidak fair juga.

Argumen terhadap Respon yang Dilakukan

Di dalam beberapa publikasi dan keterangan, baik tertulis maupun dalam dakwah yang berkaitan dengan kesesatan Syiah, Ormas FUUI banyak menggunakan dalil Al-Quran dan fakta sejarah sebagai argumennya. Hal ini terutama karena adanya perbedaan ajaran dan praktik beribadah antara Sunni dan Syiah. Perbedaan ini menjadi kontroversi yang ditujukan pada aliran ini. Perbedaan kontroversial menyangkut konsep ajaran (doktrin keagamaan), ideologi, politik, dan tradisi keagamaan, yang memiliki perbedaan cukup fundamental dengan doktrin ajaran yang dipraktikkan pengikut Islam Sunni. Dari perbedaan tersebut menimbulkan konflik dan kecurigaan antara dua kedua pihak.

Di dalam aspek doktrin-keagamaan, Islam mazhab Syiah berbeda dalam dasar-dasar teologis. Hal ini misalnya pada pemahaman Islam Sunni, seperti FUUI menyebutkan bahwa doktrin dasar ajaran (teologi) didasarkan pada 5 Rukun Islam (syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji) dan 6 Rukun Iman (Allah, malaikat, kitab suci, para Rasul, hari akhir dan takdir). Sementara Islam Syiah menganut 6 Rukun Islam dengan menambah satu rukun lagi: *wilāyah*; dan menganut 5 Rukun Iman (tauhid, keadilan,

kenabian [*nubuwwah*], *imamah*, dan *ma'ad* [hari akhir]).

Selain perbedaan dasar teologis (*ulūhiyyah*), kedua mazhab ini memiliki cara yang berbeda dalam merujuk kitab-kitab induk hadis. Rujukan hadis-hadis induk dalam Islam Sunnah dikenal dengan sebutan *al-Kutub al-Sittah* (Kitab Enam Hadis), yaitu kitab hadis karya 6 tokoh imam hadis: al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sementara di lingkungan Islam Syiah, rujukan hadis-hadis induk dikenal dengan sebutan *al-Kutub al-Arba'ah*, yaitu: *al-Kāfī* (karya Syaikh al-Kulaini); *Man Lā Yahdhuruhū al-Faqīh* (karya Syaikh Abu Ja'far ash-Sahqūq); *Tahdhīb al-ahkām*, dan *al-Istibhār* (keduanya karya Abu Ja'far ath-Thusī). Inilah empat kitab hadis rujukan umat Islam Syiah (Assegaf 1996).

Beberapa keyakinan dalam Syiah di atas, yang dinilai oleh FUUI sebagai ajaran yang sesat. Selain itu, hal yang seringkali menjadi isu dalam persoalan ajaran Syiah adalah adanya praktik nikah *mut'ah*, ke-*ma'suman* para Imam dalam Syiah, dan sikap yang menghina para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Utsman, dan Umar serta Abu Hurairah.

Perbedaan yang cukup fundamental di atas sangat memungkinkan lahirnya polemik, konflik, dan bahkan anarkisme. Pada level intelektual, perbedaan itu mungkin hanya terjadi pada tataran wacana. Namun pada level masyarakat awam, perbedaan itu bisa melahirkan aksi anarkisme dan bahkan terorisme.

Sementara di Indonesia, perbedaan itu justru melahirkan pandangan dan sikap antipati dari kelompok Islam Sunnah sebagai penganut mayoritas. Bahkan perilaku anarkis—terutama pada level masyarakat

awam—ditunjukkan oleh para pengikut Islam Sunnah terhadap pengikut Islam Syiah sebagai kelompok minoritas.

Di luar perbedaan ajaran, respon dalam bentuk penolakan terhadap Syiah oleh FUUI juga dilatarbelakangi oleh isu politik, terutama politik global, seperti konflik politik yang terjadi di beberapa negara Muslim, seperti Yaman, Mesir, dan Suriah. Secara khusus, untuk kasus di Suriah, FUUI berkeyakinan bahwa konflik tersebut bukan pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Suriah, melainkan perlawanan rakyat Suriah yang berhaluan mazhab Sunni terhadap penindasan rezim Bashir al-Assad penganut ajaran Syiah yang didukung Iran.

Di dalam rangka itu, FUUI sudah melakukan langkah lebih kongkrit dengan membuka dukungan solidaritas untuk rakyat Suriah yang bermazhab Sunni. Dalam beberapa kali tabligh akbar mereka berupaya menjelaskan pada jamaah, bahwa konflik di Suriah bukan konflik pemberontak dengan pemerintah, tetapi merupakan perjuangan pengikut Sunni terhadap rezim Syiah di bawah rezim Bashir al-Assad.

FUUI berkeyakinan, bahwa konflik tersebut menjadi sebuah analogi bahwa skenario seperti itu sangat potensial terjadi di Indonesia, jika kelompok Syiah dibiarkan berkembang. Menurut Athian Ali Da'i, bukan mustahil kalau Syiah di Indonesia sudah menjadi mayoritas atau berkembang cukup banyak, maka nasib yang pengikut Sunni juga akan sama dengan apa yang terjadi di Suriah. Kekhawatiran ini senada dengan adanya fenomena transmisi intelektual Islam Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan dari Iran (khususnya alumni Qum). Hal ini—tentu

saja—menjadi salah satu potensi besar bagi penyebaran paham Syiah di Indonesia. Artinya, dengan munculnya banyak sarjana Indonesia alumnus Iran, maka transmisi intelektualisme Islam Syiah di Indonesia semakin mengakar dan memiliki kekuatan kultural yang semakin meluas. Hal ini tentu saja dianggap—oleh sebagian ulama yang berseberangan—akan membahayakan akidah mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut Islam Sunnah. Kenyataan ini bisa berakibat pada lahirnya polarisasi dan permusuhan, sehingga—sangat mungkin—mengundang sikap antipati dan perilaku anarkis dari mayoritas umat Islam Sunnah. Kekhawatiran ini yang juga dijadikan alasan dari respon penolakan yang dilakukan FUUI terhadap Syiah di Jawa Barat.

Sementara respon dukungan dan pro Syiah oleh Ormas Muhsin relatif beragam. Sebagai sebuah aliansi dari beberapa organisasi yang beragam, ada banyak alasan di balik sikap dukungan terhadap pengikut Syiah di Jawa Barat. Terlebih lagi dalam Muhsin sangat dominan peran Jalaludin Rahmat sebagai tokoh Syiah. Karena itu, Ormas Muhsin ini lebih merupakan sebagai kepanjangan tangan Rakhmat dengan Syiah untuk membangun aliansi dengan kelompok di luar Syiah. Faktanya, sebagaimana diungkapkan beberapa orang yang hadir dalam deklarasi, keterlibatan mereka dalam Muhsin adalah sebagai bentuk simpati yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Argumen ini dapat dimengerti, karena kelompok-kelompok yang ikut mendeklarasikan Ormas Muhsin dikenal sebagai penganjur nilai pluralisme dan toleransi. Sebagian besar kelompok tersebut memiliki afiliasi dengan Nahdhtul

Ulama dan menjadi kelompok yang getol mengkampanyekan gagasan Abdurrahman Wahid di Jawa Barat.

Dukungan yang sama akan mereka berikan pada kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi, seperti Ahmadiyah maupun kelompok non-Muslim. Karena itu, alasan dari respon atau dukungan terhadap Syiah melalui Muhsin lebih bersifat universal dan bukan hanya persoalan doktrin teologis. Kelompok ini lebih menganggap, bahwa masalah keyakinan adalah masalah yang bersifat pribadi dan manusia tidak memiliki otoritas untuk menghakimi sebagai sesat atau tidak sesat.

Tujuan dari dukungan terhadap Syiah harus dipahami dalam konteks penghormatan terhadap hak warga bangsa, semua kelompok minoritas memiliki hak untuk eksis sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Shihab 2007). Karena itu, dukungannya harus dipahami dalam konteks kebangsaan sebagai upaya menjaga harmonisasi antara warganegara. Hal yang sama diungkapkan pada beberapa kesempatan oleh Jalaludin Rahmat, bahwa Muhsin tidak dalam konteks untuk mencampuradukan masalah ajaran agama. Ormas Muhsin lebih berfungsi sebagai wadah komunikasi antara Ormas-ormas yang memiliki pemahaman yang sama tentang toleransi dan pluralisme.

Basis yang menjadi fondasi aliansi dalam kelompok Muhsin adalah nilai yang lebih bersifat universal, seperti pluralisme, toleransi, hak kewargaan. Ini berbeda dengan alasan yang dibangun FUUI dalam merespon Syiah yang lebih diwarnai doktrin ajaran agama. FUUI mengajukan perbedaan ajaran tersebut untuk membuat jarak yang menegaskan antara yang salah dan yang

benar, antara yang benar dan yang sesat. Karena itu, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan FUUI dalam menolak Syiah relatif memiliki pandangan dan ideologi yang sama. Kemudian kelompok-kelompok dan pribadi yang tergabung dalam aksi penolakan Syiah adalah kelompok yang berbasiskan pada paham agama yang sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan, yakni: *Pertama*, respon terhadap eksistensi Syiah di Jawa Barat tidak seragam. Namun secara sederhana, penelitian ini membuat dua kateogori umum, yakni respon yang pro atau mendukung terhadap eksistensi Syiah. Respon ini misalnya ditunjukkan Ormas Muhsin. Ormas ini terbilang baru dan merupakan aliansi dari beberapa kelompok se-ideologi dalam memperjuangkan pluralisme dan hak minoritas. Respon berbeda adalah kontra atau menolak eksistensi Syiah dan ajarannya. Pada respon ini diwakili oleh Ormas Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Seperti juga Muhsin, FUUI berdiri dan berkembang pasca reformasi. Kelompok ini mengklaim sebagai representasi ulama dan umat yang pengikut mazhab Sunni.

Kedua, bentuk respon yang dilakukan Ormas keagamaan juga beragam. Dalam rangka merespon eksistensi Syiah, FUUI misalnya sudah mengeluarkan mengeluarkan fatwa sesat Syiah, publikasi, penciptaan opini publik, hingga penggalangan solidaritas global terhadap kelompok Sunni di Suriah. Penelitian ini menunjukkan, bahwa jaringan yang dilakukan kelompok anti Syiah jauh lebih massif dan beragam. Sementara,

bentuk respon pro dari ormas Muhsin terkesan direayasa. Setidaknya kegiatan yang sudah dilakukan seperti upaya membonceng kelompok-kelompok atau Ormas keagamaan dalam rangka mencari dukungan. Bahkan pada beberapa kegiatan, muatan Syiah berupaya mendominasi dan menunggangi Ormas yang diterima masyarakat, seperti Jakatarub, UIN Bandung dengan Iran Cornernya.

Ketiga, bentuk respon yang berbeda sangat mungkin terjadi karena basis nilai yang melandasi respon kedua Ormas tadi berbeda. FUUI lebih kompak, seragam, fokus, dan terorganisasi dalam mengkampanyekan anti-Syiah di masyarakat. Salah satu penjelasannya, karena FUUI merupakan aliansi yang berdasarkan pada nilai agama. Respon FUUI terhadap Syiah didasarkan pada dalil agama, bahwa Syiah itu sesat didasarkan pada dalil agama. Karena itu, nilai ini cenderung lebih absolut dalam mengikat kelompok-kelompok aliansi yang tergabung di dalamnya.

Sebaliknya, Muhsin lebih mendasarkan pada nilai-nilai yang lebih sekular dan universal, seperti pluralisme, toleransi, dan hak-hak kewarganegaraan. Maka, sebagaimana dijelaskan beberapa tokoh yang terlibat dalam deklarasi Muhsin, dukungannya bukan pada ajaran, tetapi pada nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan lain-lain. Landasan seperti ini mungkin tidak seabsolut nilai agama, sehingga ikatan terhadap kelompok pro ini juga cenderung longgar.

Saran

Pertama, adanya respon negatif dari sejumlah Ormas terhadap Syiah harus diantisipasi agar tidak menjadi konflik terbuka, sebagaimana yang terjadi di Sampang Madura. Ke depan respon atau reaksi yang bersifat negatif-agresif terhadap eksistensi Syiah di Indonesia dari kelompok Sunni harus diubah menjadi aksi produktif sebagai langkah preventif. Bagaimanapun, respon seperti ini justru akan merugikan kedua belah pihak dan meruntuhkan bangunan tatanan kebangsaan, dan lebih jauh menjadi citra buruk bagi citra Islam Indonesia yang toleran.

Kedua, Kementerian Agama dan lembaga keagamaan yang umumnya berafiliasi Sunni hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagaimana mendialogkan perbedaan doktrin ini di kalangan masyarakat. Seringkali justru kecurigaan terjadi karena informasi dan pendidikan tentang sejarah keduanya tidak sama kepada masyarakat. Selama ini hanya bersifat sepihak, Sunni tidak belajar Syiah dan juga sebaliknya.

Terakhir, pemerintah sebagai lembaga milik bersama harus dapat melihat kasus keagamaan secara seimbang dan adil, terutama dalam menyelesaikan pertikaian Sunni-Syiah selama ini. Realitas bahwa Syiah merupakan kelompok minoritas, tidak boleh dijadikan argumen bahwa mereka yang layak "dibela" dan dijaga hak-haknya. Tentu saja kedua belah pihak harus bekerja sama. Artinya, bila kelompok mayoritas diwajibkan menghormati hak-hak minoritas, apalagi sudah semestinya sikap seperti itu juga dipraktikkan oleh kelompok minoritas, termasuk Syiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Umar Faruk. 1996. "Madhhab Ahl al-Bayt in Nusantara: the Past and Present." *Makalah* tidak diterbitkan.
- Muzakki, Akh. 2006. "Accusations of blasphemy, Are recent fatwa evidence that moderate Islam is a myth?" *Inside Indonesia* Vol 85, Jan-Mar.
- Okezone. 2011. "Ribuan Warga Jabar Akan Hadiri Peringatan Asyura." Akses 18 Juli 2013. <http://okezone.com>
- Rakhmat, Jalaludin. 2000. *Dikotomi Sunni-Syiah: Tidak Relevan Lagi dalam Syiah dan Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkin?*. Jakarta: Lentera Hati. Suara Islam. 2012. "Pernyataan Sikap Pemuda Persis Bandung Terhadap Syiah." Akses tanggal 4 April 2013. <http://www.suara-islam.com/read/index/4632/Pernyataan-Sikap-Pemuda-Persis-Bandung- Terhadap-Syiah>.
- Tempo. 2012. "Bandung, Kantong Syiah Terbesar di Indonesia." Akses 3 Juli 2013. <http://www.Tempo.com>.
- Van Bruinessen, Martin. 1992. "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya." *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. III.
- Zulkifli. 2009. "The Struggle of The Shi'is in Indonesia." *Tesis Ph.D. Universiy of Leiden*.